

**GLOBALISATION AND STRATEGY:
“NEGARA, TERITORI DAN KEDAULATAN DI ERA
GLOBALISASI”**

Indra Kusumawardhana*

Zulkarnain**

*Dosen di London School of Public Relations (LSPR) dan Universitas Bakrie

**Dosen FISIP-HI, Universitas Nasional

Abstract

The development of Globalization in this century is far more interesting for so many academics. The main issue that becomes the area of debate is the impact of Globalization to the concept of Nation-State, territory and sovereignty (Wesphalian System). The group of skeptic thinker assume that globalization bring a negative impact to Nation-State, territory and sovereignty. In the other hand, those who put their faith in globalization argue that globalization is inevitable. Therefore, an action of reconfiguration is needed to control the shift of every aspect in the context of world politics. For the sake of this need, Nation-State needs to be strengthening in order to retain its existence and legitimation. The arguments of this paper tend to pro the second position as the staple of this paper. The nature of relationship between Globalization and Nation-State is continuous and dynamic. Therefore, reconfiguration is needed if we want to have a better understanding for the concept of Nation-State, territory, and sovereignty.

Keywords: *Globalization, Nation-State, Territory, Sovereignty*

1. Introduction

Perkembangan globalisasi di abad ini jauh lebih menarik banyak perhatian ilmuan. Isu utama yang menjadi area perdebatan nya adalah seputar dampak globalisasi terhadap konsep Negara, teritori, dan kedaulatan (*Wesphalian System*). Apakah kemudian Globalisasi membawa implikasi negatif atau positif bagi sistem *Wesphalia* tersebut? Jika membawa implikasi negatif, maka telah terjadi “*Decline of state, territory, sovereignty,*” Karena itu akan mengancam Negara bangsa yang menjadi kosmik politik dunia. Namun, jika membawa implikasi positif, maka “*Continued strength of state*”

menjadi posisi yang menguatkan ketiga konsep tersebut. Kelompok yang skeptis terhadap Globalisasi menganggap bahwa Globalisasi telah membawa dampak negatif terhadap Negara, teritori, dan kedaulatan. Sementara kelompok yang percaya akan Globalisasi; menilai globalisasi tidaklah dapat dihindari, karena itu kemudian perlu diupayakan rekonfigurasi untuk mengontrol segala perubahan yang terjadi dalam konteks politik dunia. Untuk itu Negara perlu diperkuat untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. ***Argumentasi tulisan ini lebih condong pada posisi kedua, bahwa hubungan antara globalisasi dan Negara bersifat kontinuitas dan dinamis sehingga perlu rekonfigurasi dalam memahami konsep Negara, teritori dan kedaulatan. Rekonfigurasi bukan dalam arti redefinisi, tapi lebih pada ekstentualisasi konsep Negara, teritori dan kedaulatan, karena pada esensinya unit Negara bangsa tidaklah berubah.*** Dengan demikian, Negara masih kuat di era Globalisasi ini. Namun proposisi yang menyatakan kuatnya relevansi konsep negara dalam tulisan ini menuntut sebuah pemahaman yang kuat terkait artikulasi negara itu sendiri di dalam sistem internasional yang semakin terjejaring. Oleh karena itu, tulisan ini akan menempuh jalan membedah proposisi yang secara sudut pandang merasa pesimis ataupun skeptis akan vitalitas negara dalam mempertahankan kemandiriannya di era Globalisasi sekarang ini.

2. Skeptics & Three Dimension of Globalization

Setidaknya ada tiga dimensi yang membuat Globalisasi, menurut kelompok skeptis ini, telah membawa konsekuensi “decline of state,” yaitu Globalisasi dipandang dalam dimensi ekonomi, politik dan militer dan keamanan (Göksel 2004). Pertama dimensi globalisasi ekonomi. Dimensi globalisasi ekonomi dipahami sebagai keterbukaan ekonomi global dalam hal produksi, distribusi, manajemen, perdagangan dan keuangan yang meningkatkan akselerasi barang dan jasa, modal, ide, dan migrasi manusia (Chaudhary 2005, 149; Sorensen 1998). Karakteristik utama dalam globalisasi ekonomi yang membuat *decline of state* setidaknya ada tiga hal.

Pertama, munculnya MNCs pada akhir 1960-an dan awal 1970-an semakin meningkatkan ekspansi perusahaan dalam bentuk FDI keseluruhan Negara di dunia. Perkembangan ini bisa dilihat dari ekspansi investasi perusahaan Jepang, Amerika, dan Eropa ke Negara-negara di Asia hingga memunculkan istilah NICs. Proses ini telah berdampak bagi melemahnya

kekuatan Negara dalam mengontrol kuasa MNCs (Jackson & Sorensen 1999, 206-10). Akibatnya, terjadi peralihan *power* dari Negara ke MNCs yang membuat Negara semakin dilemahkan (Strange 1997). Kedua, perdagangan financial kini menemukan transformasi baru dalam perekonomian global. Aliran modal dari satu Negara ke Negara lainnya bisa dilakukan melalui medium teknologi informasi yang memungkinkan para investor mendapat keuntungan sekejap. Derasnya aliran dana itu juga diiringi dengan semakin cepatnya pasar merespon gejolak dan instabilitas politik yang mengakibatkan aliran dana tersebut ditarik kembali oleh investor (*Capital Flight*) untuk menghindari kerugian atas investasi yang dilakukan. Globalisasi telah membawa perubahan baru bagi semakin meningkatnya aliran modal asing. Negara dalam hal ini tidak bisa mengontrolnya. Krisis Asia 1997, Krisis Global yang terjadi pada 2008 dan Krisis utang yang terjadi di Eropa saat ini menjadi sebuah realitas yang tidak terelakan bahwa Globalisasi telah membuat aliran modal itu sangat cepat bergerak. Ketiga, fenomena perdagangan bebas yang diterapkan beberapa Negara kawasan maupun dalam naungan perdagangan dunia, telah memberikan implikasi bagi semakin tak kuasanya Negara dalam perekonomian Global. Globalisasi ekonomi telah membawa Negara semakin usang oleh kekuatan MNCs dan ekspansi kapital yang begitu masif (Jackson & Sorensen 1999, 208). Tak heran jika Kenichi Ohmae (1996) menyatakan bahwa Globalisasi merupakan era berakhirnya Negara bangsa.

Dimensi kedua dari Globalisasi adalah politik. Globalisasi politik dipahami sebagai “*The processes throw which sovereign Nation-States crisis are crossed under mind by transnational actors with varying prospects of power, orientations, identities, networks*” (Chaudhary 2005, 147). Ini menandakan bahwa era Globalisasi telah memunculkan aktor-aktor non-negara dalam politik dunia yang juga memiliki power dan pengaruh sebagaimana Negara. Sebagaimana Rosenau (1990) nyatakan bahwa actor-aktor Negara tersebut merupakan *sovereign-free actors* yang semakin membuat kompleks tingkat interdependensi dalam globalisasi. Terlebih Globalisasi politik telah menciptakan *Cosmopolitan Law* dan Hukum Humaniter yang menjadi pemicu Negara semakin dilemahkan (Held & McGrew 1998).

Dimensi ketiga dari Globalisasi, menurut kelompok skeptic, adalah militer dan keamanan. Kompleksitas problem dan isu yang dihadapi Negara di era Globalisasi semakin membuat Negara tidak punya kapabilitas untuk

meredam segala aktivitas yang mengancam sistem pertahanan dan keamanannya. Ancaman di era globalisasi tidak hanya terpesentrum dari sesama aktor Negara tapi juga aktor non-negara, seperti terrorist, separatist, organisasi kriminal internasional, militant, dan lain – lain (Kahler 2005). Semakin meningkatnya perdagangan Global dan investasi financial membuat Negara semakin khawatir akan keamanannya. Tak heran jika Negara membentuk kerangka keamanan bersama, seperti NATO, telah menjadikan Negara semakin kehilangan otonomi dan kedaulatannya dalam mengontrol wilayah dan warganya (Held 1989).

Meskipun terdapat tiga dimensi yang sebenarnya saling berkelindan satu sama lainnya, tulisan ini memilih untuk tidak membahas seluruh dimensi yang dianggap melemahkan konsep negara di era globalisasi. Hal tersebut dikarenakan keinginan tulisan ini untuk dapat menghasilkan sebuah analisis yang kenyal dan tajam dalam membuktikan *thesis statement* yang telah dinyatakan di awal tulisan ini, oleh karena itu, hanya dua dimensi yang akan dibahas secara mendalam pada kesempatan ini yakni: Dimensi ekonomi dan Dimensi Politik. Namun, dua dimensi yang dipilih dalam tulisan ini akan dibahas secara berkelindan; baik ekonomi maupun politik merupakan dua aktivitas yang sulit untuk dipisahkan sekarang ini. Seperti yang dikatakan oleh Daron Acemoglu (2012) dalam bukunya “*Why Nations Fail*” bahwa “*Traditionally economics has ignored politics, but understanding politics is crucial for explaining world inequality.*” Dalam konteks tersebut Ekonomi-Politik merupakan dua aktivitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tentunya tulisan ini tidak ingin melupakan bahwa di era globalisasi itu sendiri pendekatan interdisipliner merupakan sebuah keniscayaan dalam menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di dunia yang semakin rata dan dinamis.

3. State Still Survive

Kedua dimensi globalisasi yang telah dielaborasi sebelumnya pada dasarnya menganggap bahwa Negara, teritori, dan kedaulatan semakin usang di era Globalisasi yang telah menyatukan dunia ini. Globalisasi telah menciptakan kesempatan-kesempatan yang sama bagi semua aktor dalam politik dan ekonomi Global untuk satu sama lain mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Sehingga, tak heran, hal itu malah mereduksi dan mengancam Negara bangsa sebagai entitas utama politik dunia. Tetapi hal ini

bukan berarti negara menjadi usang di dalam Globalisasi, malah di era Globalisasi ini lah peran negara sebagai konsep tradisional di tuntutan untuk menunjukkan perannya jika tidak mau di gilang oleh globalisasi.

Namun dalam meretas eksistensi negara di era globalisasi sekarang ini; tulisan ini merasa perlu untuk sedikit membahas terkait artikulasi hubungan internasional antar negara dalam konteks politik dunia. Politik dunia secara konvensional dipahami dalam istilah ‘Internasional’, walaupun pola – pola konflik dan kerja sama yang lebih besar antara unit politik yang berbasiskan teritori telah ada sepanjang sejarah umat manusia, istilah ‘*International Relations*’ belum menunjukkan dirinya hingga istilah tersebut dipakai oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dalam karyanya ‘*the principles of morals and legislation*’ (1789).

*Wherever different territorially-based political orders coexist in the same social world some form of **international relations** is to be found – even though the term itself was not coined until the end of the eighteenth century.* (Bentham 1789/1960: 426) Bentham pada masa itu mengkritisi kejumudanan terminologi frasa bahasa Inggris ‘*Law of Nations*’ menjadi acuan dalam hubungan antara negara – negara yang berdaulat.

The origin of the term ‘international’ is often traced to the British utilitarian political and legal theorist, Jeremy Bentham, and his work in 1780. Bentham was criticizing the English phrase ‘Law of Nations’ – an imprecise misnomer used to refer to the law on the relations between sovereign states. He was interested in those aspects of law that did not fall under the internal jurisdiction of states, and proposed that in those instances speaking of the ‘international’ would be more appropriate than of legal governance between ‘nations’. (Aalto, Pami et al. 2011)

Argumentasi Bentham tersebut meletakkan platform dasar dari hubungan antar – negara yang berdaulat. Interaksi lintas batas ini juga memasukkan individu – individu yang sifatnya pribadi, baik antar individu atau antar negara terkait dengan internal yurisprudensi.¹ Pada masa itu mulailah muncul apa yang disebut konsep ‘Internasional’ didalam diskursus politik dunia.

Penggunaan istilah ‘internasional’ juga merupakan pengakuan Bentham bahwa terjadi perubahan yang signifikan dengan sistem dunia pada saat itu; Bahwa pada akhir abad ke-18, unit – unit politik berbasiskan teritori

dengan kedaulatannya semakin menunjukkan karakter nasional. Secara logis membuat hubungan antar negara nampak menjadi 'inter-nasional'. Walaupun kebanyakan dari negara modern adalah negara-bangsa atau nampaknya saja terinspirasi oleh negara-bangsa, status mereka sebagai sebuah negara lebih memberikan legitimasi untuk bertindak di panggung dunia daripada kebangsaan yang mengikat mereka dalam suatu kawasan yang spesifik. Negara pada posisi ini menurut Cerny (2010) memiliki struktur dualitas yakni satu muka melihat kedalam dan satu muka melihat keluar.

Seketika pertanyaan yang muncul adalah apakah itu negara? *As defined by the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, a state must possess four qualifying properties: a defined territory, a permanent population, an effective government, and the 'capacity to enter into relations with other states'*. (Heywood, Andrew, 2011) Dalam pandangan ini negara menjadi satu – satunya aktor kunci yang memiliki pengaruh di dalam konstelasi dunia. Mengakarnya pemahaman ini membuat pendekatan politik dunia dianggap *state-centric*, bahkan sistem internasional sering dipotret sebagai *state-system*. Jackson & Sorensen (1999, 9-17) menyatakan bahwa cikal-bakal dari pandangan ini biasanya mengacu pada '*peace of westphalia*' (1648), dimana kedaulatan muncul menjadi ciri yang membedakan negara. Pada masa itu, kedaulatan negara menjadi prinsip utama dalam kontestasi politik dunia.

Namun, pendekatan *state-centric* pada politik dunia menemukan tantangan dan menjadi sulit untuk dipertahankan . Hal ini terjadi dikarenakan kenyataan yang menunjukkan bahwa tidak menjadi mungkin untuk tetap memperlakukan negara sebagai satu – satunya aktor yang menentukan dalam dinamika panggung dunia. Munculnya perusahaan – perusahaan trans-nasional, organisasi – organisasi *non-state* seperti NGO, Al-Qaeda dan ISIS mulai mempengaruhi bagaimana politik dunia digaungkan. Munculnya Globalisasi² memunculkan perdebatan yang sejauh pengetahuan tulisan ini memiliki tiga posisi yang berlawanan; Pertama, beberapa teoritis IR mengklaim akan munculnya '*post-sovereign government*' (Scholte, 2005), dimana munculnya globalisasi telah mereduksi kemampuan negara sebagai aktor kunci. Bahkan dalam titik terekstrem yang biasanya disebut '*hyperglobalist*' seperti Ohmae (1996) menyatakan negara telah mati. Kedua, kaum realist yang kebanyakan skeptis terhadap Globalisasi menolak anggapan tereduksinya kekuatan negara sebagai aktor kunci dalam politik

dunia. Diantara kedua pandangan ini terdapat posisi ketiga yang menyatakan bahwa globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang kualitatif terhadap peran negara, dan terhadap kedaulatan. Namun posisi ketiga menekankan pada transformasi yang dialami oleh negara daripada berkurangnya peran negara.

Walaupun pada tataran tertentu tulisan ini sepakat dengan pendapat bahwa *The shrinking of the planet is a celebrated feature of contemporary globalization* . (e.g. Giddens, 1985; Held et al., 1999). Namun mempelajari politik internasional merupakan upaya untuk mempelajari implikasi dari sistem internasional yang dibedakan dalam unit negara – negara yang berdaulat. Kedaulatan-lah yang membuat negara dilihat sebagai sebuah entitas yang otonom dan independen, Pendekatan *State-Centric* ini biasanya digambarkan dalam model bola billiard (*Billiard Ball Model*) , dimana era tahun 1950 di dominasi oleh model pemikiran seperti ini dikarenakan dunia dalam kondisi *warfare era* dan sedang terjangkiti oleh demam teori realis yang melihat negara sebagai aktor kunci untuk mengamankan *national interest*.

Model ini menganggap bahwa negara ibaratnya bola *billiard* yang tidak dapat ditembus namun dapat mendapat tekanan dari luar dan saling mempengaruhi satu – sama lainnya melalui interaksi. Lebih dari sekedar berinteraksi namun tekanan – tekanan yang dilakukan satu sama lain membuat negara bergerak, berinteraksi dan bekerjasama bahkan dalam kondisi yang ekstrem berperang. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian pada tatanan internasional seperti ini adalah keamanan dikarenakan asumsi bahwa kekuatan dan keberlangsungan dari negara merupakan prioritas utama. Dalam hal ini interaksi lintas batas negara masih didominasi oleh isu – isu perang dan perdamaian dengan instrumen Diplomasi dan aksi – aksi militer menjadi prinsip bentuk interaksi ‘inter-state’.

Model bola billiard setidaknya memiliki dua implikasi; pertama, model ini membedakan antara politik domestik yang lebih bersifat *inward-looking* dengan politik internasional yang lebih bersifat *outward-looking*. Sifat kedua berkaitan dengan hubungan antar – negara dimana kedaulatan menjadi cangkang keras yang menghalau penetrasi aktor dari luar untuk ikut campur dalam urusan politik domestik; Dalam hal ini batas negara menjadi penting. Kedua, model ini secara implisit menunjukkan bahwa pola – pola konflik dan kerjasama didalam sistem internasional ditentukan oleh distribusi kekuatan diantara negara – negara yang berdaulat. Dalam hal ini, model bola

billiard dikritik bahwa hubungan antar negara tidak dilandaskan dalam kesamaan kekuatan antar negara didalam sistem internasional. Beberapa perilaku negara yang memiliki kekuatan lebih besar sering menerobos batas – batas kedaulatan negara dan mengintervensi politik domestik negara yang lebih lemah.

Namun model bola *billiard* menemukan tantangan dan keterbatasannya dikarenakan tren kontemporer dan perkembangan teknologi. (Andrew Heywood, 2011) Dua faktor ini mempunyai pengaruh yang lebih luas; pertama, adanya peningkatan yang signifikan berkaitan dengan perpindahan manusia, barang dan modal ‘*The first is that there has been a substantial growth in cross-border, or **transnational**, flows and transactions – movements of people, good, money, information and ideas*’. (Ibid. Hal.7) Kedua, Perkembangan teknologi informasi membuat dunia semakin interconnected dan interdependence. *Tasks such as promoting economic growth and prosperity, tackling global warming, halting the spread of weapons of mass destruction and coping with pandemic diseases are impossible for any state to accomplish on its own, however powerful it might be.* (Andrew Heywood, 2011) Hurrell (2007) dalam bukunya ‘*On Global Order, Power, Values, and the Constitution on International Society*’ juga menyebutkan tantangan Globalisasi dan keterhubungan entitas – entitas dunia meningkatkan gelombang terbentuknya masyarakat sipil global yang sifatnya transnational;

*Globalization and increasing economic and human interconnections between societies, the increasing seriousness of ecological challenges, democratization and changing notions of political legitimacy, the continued growth of **transnational** economic actors and the emergence of a dense and increasingly active transnational civil society, the decline in use of large-scale military force between major states together with the parallel expansion of many other forms of social violence, and the degree to which the state is under challenge as a legitimate and effective building-block of international order...* (Andrew Hurrell, 2011)

Kembali transnasional diatributkan kepada aktor – aktor yang muncul dikarenakan Globalisasi dunia. Sebenarnya definisi ‘Transnasional’ menurut Heywood (2011) adalah ‘*A configuration, which may apply to events, people, groups or organizations, that takes little or no account of national*

government or state borders; transnational as distinct from ‘international’ and ‘multinational’. Transnasional berbeda dengan internasional bahkan multinasional. Transnasional digunakan untuk menggambarkan begitu kompleksnya keterkaitan dunia di era kontemporer hingga tidak ada batas – batas teritori yang dapat menjadi tembok – tembok pembatas.

Meminjam argumen Buzan (2015) dalam bukunya *‘The Global Transformation; History, modernity and the making of international relations’* untuk menjelaskan intensifikasi dan ekstensifikasi yang menggerakkan peradaban bahwa kapasitas interaksi dalam transformasi global bukanlah masalah kapasitas untuk memindahkan barang semata, namun jauh lebih dari itu merupakan masalah kecepatan dalam rentang waktu yang singkat untuk terhubung di dalam dunia yang semakin menyempit dikarenakan teknologi manusia yang semakin maju. Unit politik harus dapat mendukung kestabilan interaksi ini atau akan digerus oleh zaman. Inilah Transnasional menurut tulisan ini, batas – batas teritori negara yang merupakan hasil dari tatanan dunia lama dihadapkan pada aktor – aktor baru yang memiliki atribut ini.

Berbagai argumentasi yang mengajukan proposisi ketidak berdayaan negara di era Globalisasi kebanyakan bertolak dari dinamika yang berinteraksi di aras global dewasa ini. Namun, ada hal yang dilupakan kelompok skeptis yang menganggap globalisasi telah membuat usang konsep Negara, teritori, dan kedaulatan. Weiss (2000) mengungkapkan bahwa integrasi dan keterbukaan Negara dalam perekonomian global merupakan keputusan politik yang diambil Negara untuk merespon segala perubahan dan dinamika eksternal. Ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kapitalisme global yang kini menjadi tatanan utama perekonomian global. Namun bukan berarti Negara kemudian kehilangan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengatur dimensi ekonomi domestik dan global tersebut. Weiss (2000, 11) lebih lanjut mengatakan bahwa *“In certain important respects „globalization“ is often the by-product of states promoting the internationalization strategies of their corporations.”* Globalisasi malah memberi berbagai kesempatan bagi Negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, daripada hilangnya kapabilitas Negara dalam dimensi ekonomi. Pandangan serupa diungkapkan Krasner (1993, 314) bahwa *“Economic development has made it generally easier for state to finance their activities... From internal sources rather than international borrowing,...”* Negara masi memiliki kapasitas mengontrol

dimensi ekonomi dan Masyarakat yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Ada beberapa negara berhasil mengatur dan berintegrasi dengan globalisasi dengan baik tetapi ada juga yang malah melakukan kesalahan dalam berintegrasi dan akhirnya kehilangan kapabilitasnya dalam mengatur dimensi ekonomi negaranya yang akhirnya berimplikasi politik.

Krisis Utang (*Sovereign debt*) di Eropa yang dimulai dari Yunani dapat menjadi contoh mengenai integrasi dan keterbukaan Negara dalam perekonomian Global merupakan keputusan politik yang diambil oleh Negara untuk merespon segala perubahan dan dinamika eksternal. Krisis yang ramai dibicarakan oleh kalangan akademisi ini dimulai di pertengahan tahun 2010, namun dalam tataran empirisnya hal itu hanyalah manifestasi klimaks dari krisis tersebut, karena pada dasarnya krisis ini telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Krisis Finansial sendiri memang sering diidentikan dengan krisis ekonomi, yang terpenting adalah memahami bahwa krisis finansial bukan hanya mengenai tingkat ekspor-impor namun lebih jauh, perihal situasi yang semakin memburuk diperbankan, bisnis skala besar, dan kebijakan moneter.³

Jika melihat fenomena kekinian dimana Uni Eropa sekarang menghadapi krisis terparahnya didalam sejarah, para penggagas teori – teori integrasi Eropa harus menganggap diri mereka seorang utopis melihat hasil dari buah pikirannya telah secara brutal menghancurkan ekonomi negara – negara pengguna mata uang Euro dan mengakui bahwa krisis yang terjadi merupakan sebuah penegasan akan superioritas politik diatas ekonomi. Mereka telah meremehkan ‘political will’ yang sejak awal menjadi pendorong terbentuknya mata uang tunggal dengan logika bahwa Integrasi ekonomi akan merembet pada sebuah integrasi politik. Integrasi ekonomi hanya akan berkontribusi pada integrasi politik jika integrasi ekonomi tersebut sukses dan memberikan keuntungan keseluruhan anggota – anggota integrasi. Namun jika yang terjadi sebaliknya maka integrasi tersebut hanya menimbulkan krisis politik yang menurut Paul Krugman (2011) di karenakan berbagai pemerintahan nasional yang berbeda menjadi subjek dari tekanan politik yang berbeda – beda dan akhirnya menciptakan sebuah konflik politik. Sekarang, Integrasi ekonomi yang mereka serukan itu di ibaratkan sebuah kendaraan penghancur yang menggilas negara – negara anggotanya.

Yunani sebagai anggota Uni Eropa yang paling parah terkena krisis ekonomi-politik juga tidak terlepas dari kesalahan dalam mengambil

kebijakan dalam mengelola negara, yaitu memiliki hutang yang begitu banyak ke *International Monetary Fund* (IMF), yang nyaris tidak terbayarkan, ditambah dengan defisit yang tinggi serta kondisi ekonomi makro yang kacau. Keadaan ini kemungkinan besar merupakan buah dari akumulasi kesalahan kebijakan pemerintahan di masalalu. Di tahun 1999 silam Yunani telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota kumpulan negara Eropa. Tapi, nyatanya per tanggal 1 Januari 2001, Yunani akhirnya resmi menjadi anggota Euro Zone. Kendati, manakala menengok ke sejarah lampau, Athena memang tak seharusnya diterima. Laporan negeri dewa – dewi itu disinyalir di manipulasi demi memenuhi persyaratan masuk zona Euro. Terutama berkaitan dengan pencatatan utang negaranya. Awal tahun 2010, diketahui bahwa Pemerintah Yunani telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lainnya untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka hutang sesungguhnya. Pemerintah Yunani juga diketahui telah mengutakatik data statistik ekonomi makro, sehingga kondisi perekonomian mereka tampak baik-baik saja. Pada Mei 2010, Yunani sekali lagi tertangkap basah telah mengalami defisit hingga 13.6%.⁴ Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US\$ 20 milyar per tahun⁵ Semakin jelas kini, bahwa pada dasarnya penyebab krisis Yunani begitu kompleks.

Greece lied and cheated its way into the euro. It completely made up the figures that squeezed it into the euro, and, once it was inside, made no attempt to play by the rules. When confidence in the country collapsed, they expected the rest of Europe to bail them out. But what kind of club is it where you can cheat your way in, ignore the rules, then expect the other members to pick up your bar bills? Not one that anyone is going to want to belong to for long (Lynn, Matthew. 2011)⁶

Sebenarnya fakta – fakta sudah menunjukkan bahwa negara yang sempat dipimpin sementara oleh Panagiotis Pikrammenos sudah jelas buruk dan tak layak bersanding dengan anggota Euro Zone lainnya. Kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani ketika akan memasuki European Union dan ketika sudah menjadi Anggota merupakan keputusan politik yang diambil oleh pemerintahan Yunani sendiri. Tetapi hal ini dapat dimaklumi karena kondisi yang merunut pada tujuan mulia pembentukan mata uang kumpulan negara – negara Eropa. Baik itu kerja sama

perekonomian maupun sector – sector penting lainnya. Bahkan, keterkaitan perbankan, *financial* atau pinjaman lunak mendorong optimisme negara – negara di kawasan daratan Eropa untuk bergabung didalam organisasi regional. Akan tetapi, menyeruaknya problem *sovereign debt* yang mendera Yunani ini akhirnya menjadi kabut gelap di kawasan yang hingga kini.⁷ Bergabung dengan organisasi regional dengan fundamental ekonomi yang buruk lah yang membuat Yunani menjadi pesakitan di dalam krisis dan akhirnya kehilangan kontrol terhadap dimensi ekonominya.

Krisis Ekonomi di Eropa juga kembali menegaskan kembalinya pandangan berbasis kedaulatan di era integrasi ekonomi bahkan politik sekarang ini. Dengan mencuatnya fenomena Brexit (*British Exit*) yang berujung pada mundurnya perdana menteri Inggris David Cameron seakan menjadi tanda untuk sebuah babak baru bagi Inggris dan Uni Eropa pasca referendum yang dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni 2016⁸; Sejak detik itu jalan terjal terhampar bagi Uni Eropa sebagai sebuah agenda besar regionalisme yang banyak menjadi inspirasi berbagai organisasi regional dunia. Namun, optimisme terhadap Uni Eropa berbalik dan membuat harapan itu terserak kacau dengan adanya krisis ekonomi yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun 2008 hingga akhirnya terkulminasi dengan fenomena “Brexit”.

Fakta bahwa gelombang balik paling keras sepanjang sejarah integrasi Eropa ini mencuat di Inggris Raya berakibat terjadinya aksentuasi kemungkinan untuk keluar dari mekanisme regional Uni Eropa yang *rigid* serta memunculkan keraguan akan soliditas dari Uni Eropa sebagai sebuah Organisasi Regional. Terlepas dari fenomena tersebut seakan menjadi bukti terhadap pendapat kaum *Europessimism* yang skeptis terhadap integrasi regional ala UE. Sedangkan keputusan Inggris Raya merupakan bukti negara masih memiliki legitimasi untuk menarik diri dari agenda integrasi jika dirasa merugikan. Meskipun sikap panik Inggris Raya tidak terlepas dari krisis ekonomi politik yang menghantui benua biru sekarang ini. Krisis ekonomi politik yang terjadi di zona Eropa merupakan sebuah krisis yang unik, dikarenakan integrasi ekonomi regional yang rigid mengharuskan krisis ini ditangani di dalam kerangka penyelesaian regional. Karena itu, negara anggota ditempatkan sebagai aktor yang memainkan peran penting dalam regionalisme ini. Huelshoff (1994) menjelaskan bahwa untuk memahami pilihan-pilihan dari sebuah negara, diharuskan melihat dan memahami

dinamika internal dari negara tersebut dan memperhatikan signifikansi dari konteks politik domestik. Sedangkan problematika di benua biru terhampar dalam kondisi , di satu sisi, kecenderungan peningkatan proses integrasi dan keuangan regional yang bertujuan menciptakan pasar tunggal.

Dengan konsepsi tersebut, setiap upaya Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis yang terjadi harus melalui proses negosiasi negara-negara anggota. Hal ini karena sifat Uni Eropa yang intergovermental. Dalam hal ini negara-negara besar seperti Jerman, Prancis dan Inggris mempunyai posisinya masing-masing. Bahkan Yunani sebagai negara yang dalam kondisi kritis menunjukkan sikap tidak patuhnya terhadap otoritas Uni Eropa dengan memunculkan agenda referendum mengenai persetujuan menerima dana talangan dari ESFS (Reuters, 2011). Krisis di Zona Eropa menunjukkan sebuah realitas dari kelemahan integrasi ekonomi seperti Uni Eropa bahwa negara-negara yang mempunyai *leverage* kuat seperti Jerman atau Prancis cenderung memaksakan kepentingan nasional masing – masing. Hal ini terlihat dari cara mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berimplikasi kawasan. Namun, pengaruh dari negara – negara besar di dalam UE ternyata tidak cukup untuk merebut rasa percaya rakyat di negara-negara anggota, Sehingga negara – negara dalam UE rentan untuk mendapat tekanan dari dalam dikarenakan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi-politik di dalam negeri. Dari sini dapat terlihat bahwa Negara tetap memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya di era Globalisasi, bagaimana mereka berintegrasi terhadap globalisasi lah yang menentukan apakah kedaulatan negara tersebut akan tergerus atau semakin menguat.

Hanya saja, ada hal yang perlu ditekankan oleh Negara dalam menghadapi globalisasi. Setidaknya Weiss memberi penjelasannya mengenai hal ini seperti yang dinukil dari Rodrik (1996), yaitu *“if governments wish to avoid social instability while preserving the benefits of open markets, they must provide the social protection to reduce those pressures. In this view, globalization has gone too far and accordingly increased rather than diminished the need for public intervention.”* Dengan kata lain Weiss (2000, 10) ingin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diabaikan oleh kelompok skeptis yang menganggap Globalisasi telah mereduksi dan melemahkan Negara dengan segala atributnya (teritori dan kedaulatan), yaitu kemampuan adaptabilitas Negara dalam merespon kondisi eksternal, kapasitas setiap Negara dalam menghadapi globalisasi, dan pentingnya *power* negara ketika menghadapi lingkungan internasional yang penuh dinamika.

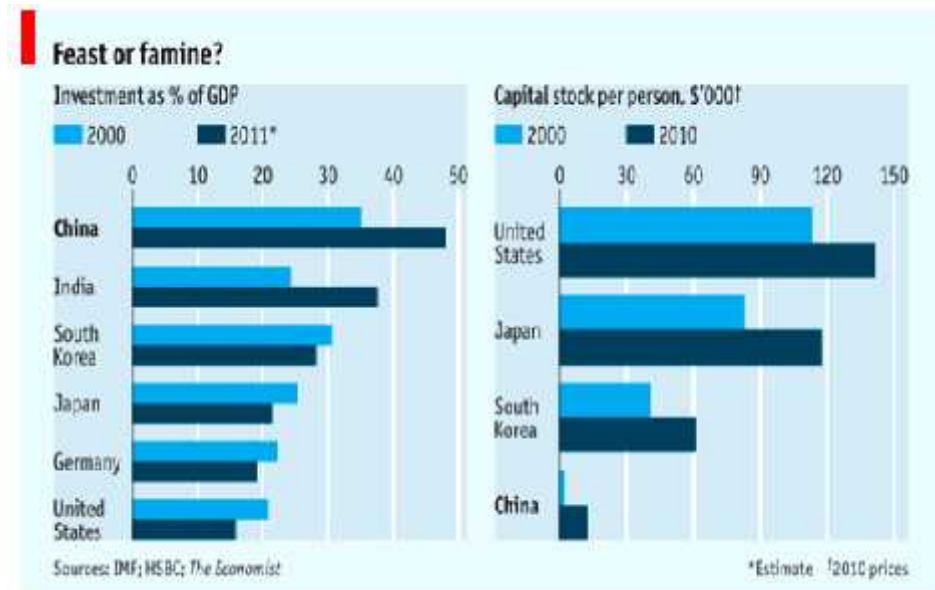
Tiga hal ini yang tidak dilihat kelompok skeptis dalam menilai Globalisasi dan negara bangsa. Kasus yang menarik mengenai hal ini adalah kebangkitan China yang bertumpu pada peran negara dalam integrasinya keperekonomian Global. Negara tidak sama sekali kehilangan perannya dalam mengontrol ekonomi dan teritori yang menjadi factor produksinya. Negara malah melakukan konfigurasi regulasi terhadap sector – sector mana saja yang dapat dikelola privat, dan sector mana yang dianggap strategis bagi negara, serta sector yang menjadi dominan keduanya. Bahkan ketika China menjadi anggota WTO, negara masih memiliki kedaulatan ekonominya untuk tetap mempertahankan sistem kurs *fixed exchange rate* yang selama ini dianggap sebagai kekuatan utama kompetisi produk China di luar negeri. Kemampuan China mempertahankan kedaulatan ekonominya ini juga membantu China untuk melewati krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 – 1998. Hal ini diungkapkan oleh Martin Jacques dalam bukunya „*When China rules the world: the rise of the Middle Kingdom and the end of Western World*”.

The Asian financial crisis in 1997 – 1998 confirmed Chinese leadership in its aversion to shock treatment: that China should move with great caution in its financial reform and resist any premature Liberalization of the capital account that would allow the free movement of capital into and out China, and consequent floating of the Chinese currency, the Renminbi (also called the Yuan), which might lead to speculative attacks on the currency and the consequent destabilization of the economy, as happened to South Korea, Thailand and Indonesia to their great cost during the Asian crisis. (As the consequences, the renminbi remain, unlike Dollar, Yen and Euro, for example, a non-tradable currency). (157)

Pernyataan Jacques tentang Cina ini sejalan dengan yang diungkapkan Weiss diatas bahwa negara selalu memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetisi korporasinya di level Global. Bahkan pada 2011 Cina menjadi negara yang paling besar investasinya hingga membuat IMF khawatir tentang dampak perilaku investasi Cina yang berlebihan terhadap perekonomian Global. (Lihat Tabel. 1 dibawah)

“THE IMF says so. Academics and Western governments agree. China invests too much. It is an article of faith that China needs to rebalance its economy by investing less and consuming more.

Otherwise, it is argued, diminishing returns on capital will cramp future growth; or, worse still, massive overcapacity will cause a slump in investment, bringing the economy crashing down”⁹.



Terlepas dari apakah perilaku ini dapat menjadi sesuatu yang baik atau buruk tetapi dapat dilihat bahwa Cina mampu menunjukkan pentingnya peran Negara dalam menghadapi tantangan – tantangan yang ada karena adanya Globalisasi ekonomi. Cara Malaysia merespon badai krisis moneter pada tahun 1997 – 1998 juga menunjukkan pentingnya peran negara di era Globalisasi. Pada waktu krisis terjadi, Malaysia memilih untuk tidak menerima solusi – solusi IMF dalam mengatasi krisis tetapi malah melakukan kontrol kapital. Cara Malaysia yang tidak biasa ini lah yang menyelamatkan negara dari kemunduran ekonomi.

The Malaysian economy started to grow strongly in the second quarter 1999, when it expanded by 4.1%. In fact, the recovery started in the first quarter of 1999 when the economy contracted by only 1.3%. Growth actually began in February and March 1999, averaging 1.4%, but this was obscured by a sharp contraction in January 1999, so that the overall growth in the first quarter was negative.¹⁰

Dengan demikian tesis utama kelompok yang skeptic terhadap Globalisasi tidaklah sepenuhnya benar. Pertama, seperti yang dikemukakan

Göksel (2004), globalisasi bukanlah hal baru dan tidak ada yang baru dalam Globalisasi (*nothing new*). Hirst & Thompson (1996, 186) menyatakan bahwa “*There is no strong tendency toward a globalised economy and the major advanced nations continue to be dominant.*” Perkembangan globalisasi sekarang yang lebih ekstensif bukanlah hal yang unik dalam sejarah ekonomi dunia. Bahkan jauh sebelum 1990-an, globalisasi menunjukkan tren yang lebih masif daripada setelahnya. Seperti yang diungkapkan Chaudhary sebelumnya bahwa globalisasi bukanlah sebuah fenomena baru, karena ekonomi dunia telah mengglobal bahkan berabad-abad tahun yang lalu intensitas dan proses globalisasi lebih masif (lihat tabel 2 di bawah). Proses globalisasi semakin intens sejak abad ke-20 (periode 1870-1940) yang diwujudkan dengan semakin cepat dan meningkatnya aliran barang, modal, dan manusia (migrasi) seiring dengan revolusi teknologi di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi (Stiglitz 2005, 228; Chaudhary 2005, 142; Göksel 2004, 7). Namun, periode intensitas globalisasi tersebut semakin mengalami deklinasi saat terjadi perang dunia dan perang dingin hingga keruntuhan Soviet.

Table 1: Measures of globalization

Measure	Pre-1914	Mid-twentieth century	1990s
FDI ^a	9.0 (1913)	4.4 (1960)	10.1 (1995)
CAD ^b	3.8 (1910-1914)	1.8 (1950-1954)	2.7 (1990-1996)
Net migration US ^c	5.4 (1870-1901)	2.7 (1950-1960)	2.0 (1980-1986)
Merchandise exports ^d	8.7 (1913)	7.0 (1950)	13.5 (1990)

^a World foreign direct investment (FDI) stock as per cent of world output. ^b Absolute value of current account deficits (CAD) as per cent of world output. ^c Net immigration to the United States as a proportion of US population. ^d As per cent of world gross domestic product (GDP). Sources: Baker et al. 1998; Dawkins and Kenyon 1999.

Sumber: Baker dkk 1998 dan Dawkins & Kenyons 1999 dalam Quiggin 2005, 2.

Globalisasi yang terjadi saat ini lebih pada konsentrasi modal dan investasi hanya di negara-negara maju. Tak heran jika, arus perdagangan, keuangan, dan modal/investasi terjadi diseputar empat kekuatan ekonomi dunia yaitu Amerika, Cina, Jepang, dan Eropa. Selain itu, tiga kekuatan ekonomi dunia tersebut, melalui *power* yang dimiliki, dapat mengatur tendensi politik-ekonomi dan pasar dunia sesuai dengan kepentingan mereka masing – masing. Artinya bahwa negara bangsa masih memiliki peranan yang signifikan dalam mengatur batas-batas teritorialnya dalam hal aktivitas

ekonomi maupun politik (terlepas dari masalah power yang melekat di setiap negara). Selain itu, negara masih dipakai sebagai atribut bagi status kewarganegaraan individu. Dengan demikian negara masih memegang kendali sebagai *legitimate power*. Hirst & Thompson (1996, 56-8) juga mengungkapkan bahwa globalisasi tidak serta merta mendelegitimasi negara dan kedaulatannya dalam konteks dunia yang multi aktor dan multi polar ini. Yang terjadi malah, beragamnya isu dan aktor yang terlibat dalam politik internasional tersebut, semakin memunculkan kebutuhan untuk saling koordinasi dan kooperasi satu sama lain dalam menghadapi *trans-boundary issues*. Peningkatan kapasitas koordinasi dan kooperasi tersebut mencerminkan suatu kondisi bahwa negara masih pegang kendali dalam menghadapi tantangan di era Globalisasi (Weiss 2000, 12). Ini mencerminkan argumentasi kedua dari tulisan ini, yaitu bahwa negara melakukan interaksi dengan kekuatan lain di era Globalisasi. Göksel (2004, 9) menyatakan bahwa interaksi tersebut merupakan bukti yang menguatkan bahwa negara tidaklah terisolasi dalam dunia internasional yang multiaktor dan multipolar. Interaksi tersebut malah menghasilkan kesepakatan – kesepakatan dalam menghadapi tantangan bersama.

Ketiga, perkembangan Globalisasi yang terjadi sekarang tak lepas dari dukungan penuh negara dalam mencapai tahapan-tahapan pembangunan yang mapan dan maju (Göksel 2004, 9). Negara menjadi sumber pendanaan utama dalam proses Globalisasi yang menghasilkan berbagai opsi – opsi ekonomi dan inovasi teknologi yang mempercepat proses pembangunan dunia. Munculnya negara – negara industry baru di Asia Timur yang dikenal dengan *Asian Miracle*, merupakan kasus yang membuktikan bahwa perkembangan pembangunan dunia dan globalisasi yang menyertainya bukanlah hal yang terjadi diluar kontrol negara (Jackson & Sorensen 1999, 201-6). Dengan demikian, negara dalam hal ini lebih pada *perpetrator* atau *catalyst* daripada *victim* dari proses Globalisasi kontemporer (Weiss 2000, 12)

4. Simpulan

Globalisasi yang pada awalnya merupakan sebuah cerita mengenai jendela yang terbuka dimana entitas – entitas yang sebelumnya tersegregasi dalam batas – batas teritori Negara - Bangsa sebagai atribut utama dalam pranata politik dunia menyadari eksistensi negara di luar batas kedaulatannya, kemudian kesadaran tersebut ditindak lanjuti dengan sebuah kebijakan–kebijakan untuk membuka pintu terutama dalam aktivitas

perdagangan lintas batas negara. Sekarang ini telah berada pada sebuah kondisi terintegrasinya seluruh entitas – entitas dunia sebagai satu entitas besar masyarakat global. Tulisan ini telah mengajukan pendapatnya terkait konsep negara beserta kedaulatan dan teritorinya ditantang oleh proses globalisasi; meskipun tantangan – tantangan yang dihasilkan sebagai eksekusi dari proses globalisasi memang diakui namun negara secara tegas dinyatakan dan dianggap dalam tulisan ini masih sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang memiliki legitimasi untuk menentukan nasibnya sendiri serta ikut membentuk bagaimana hubungan internasional yang terwujud dalam politik dunia diartikulasikan.

Pendapat tersebut terlihat dari berbagai fenomena ekonomi-politik di era globalisasi sekarang ini yang masih menunjukkan bahwa negara masih memiliki kekuatan serta kekuasaan untuk merumuskan berbagai strategi untuk dapat menaklukkan tantangan untuk terintegrasi secara global. Kebanyakan kegagalan dari negara yang tidak cukup waspada dan memilih lambat dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dikarenakan proses Globalisasi menjadi alasan utama mengapa ada beberapa negara yang pada akhirnya gagal dan tertinggal dalam beraktivitas di dunia yang semakin terjejaring. Negara – negara seperti Cina, Vietnam, Malaysia dan Singapura dapat menjadi contoh untuk menguatkan pendapat bahwa negara masih memiliki peran strategis dalam memajukan rakyatnya. Terutama ketika berbicara kedaulatan dan teritori; negara yang lemah dalam menjaga kedaulatan serta teritorinya cenderung menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan politik dunia. Sehingga kapasitas negara dalam mengelola kedaulatan dan teritori menjadi sangat penting di era globalisasi sekarang ini. Globalisasi memang membawa konsekuensi – konsekuensi logis bagi negara beserta atribut yang melekat bersamanya (teritori dan kedaulatan) seperti yang dikemukakan oleh kelompok skeptis. Namun, sebesar apapun konsekuensi tersebut, kelompok skeptis telah mengabaikan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki negara sebagai entitas politik yang berdaulat dan unit kosmik politik dunia dalam menghadapi, menangani, dan mengontrol hal destruktif dari Globalisasi. Maka dari itu, pendapat kelompok skeptis tidak sepenuhnya benar karena seperti yang dikemukakan Held & McGrew bahwa *State still survive* dan strategi – strategi di atas harus diterapkan dalam dinamika Globalisasi. Mengacu pada kondisi dunia yang sedang berusaha memahami dampak dan implikasi dari krisis utang di Eropa yang rawan

menjadi krisis global, maka negara – negara di dunia ini perlu memikirkan kembali posisinya dan juga perannya di era Globalisasi.

ENDNOTE

- ¹ Seperti yang dinarasikan oleh Suganami, H. (1978) dalam sebuah jurnal berjudul ‘A Note on the Origin of the Word “International” ’, *British Journal of International Studies*, 4(3): 226–32.
- ² Setidaknya ada tiga dimensi yang membuat Globalisasi, menurut kelompok skeptis, telah membawa konsekuensi “*decline of state*” yaitu Globalisasi dipandang dalam dimensi ekonomi, politik dan militer dan keamanan (Göksel 2004)
- ³ Anonym, n.d. [online] www.pfhub.com/financial-crisis/. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.
- ⁴ Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan standart toleransi defisit Uni Eropa yang hanya 3%
- ⁵ Anonym. 2010. *Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis*. [online] www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all
- ⁶ Lynn, Mattew. "Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis." (2011).
- ⁷ Bahkan pada tahun 2012 *The Economist* mengeluarkan edisi dengan tajuk “Europe’s Achilles heel”, didalam *The economist* edisi ini, sejauh yang dapat saya temukan terdapat artikel – artikel yang mengulas jika partai yang memenangkan pemilu Yunani menolak untuk pemotongan anggaran belanja dan reformasi structural, hal ini akan membuat European Union menghadapi pilihan sulit antara tetap mengakomodasi Yunani dengan memberikan dana talangan atau mengeluarkan Yunani yang bisa menciptakan dampak buruk dengan keluarnya negara – negara anggota lainnya. Sedangkan keputusan ini menunggu pemilu kedua pada tanggal 12 juni 2012.
- ⁸ Diskusi terkait konsekuensi keputusan rakyat Inggris dalam referendum tersebut dapat dibaca di alamat berikut <http://www.e-ir.info/2016/06/29/brexit-the-result-and-its-implications/>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.
- ⁹ <http://www.economist.com/node/21552555>
- ¹⁰ <http://www.iseas.edu.sg/trends996.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Acemoglu, Daron, and James Robinson. *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business, 2012.
- Bentham, J. (1789/1960) *Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Basil Blackwell).
- Buzan, Barry, and George Lawson. *The Global Transformation: History, Modernity and the Making of International Relations*. Vol. 135. Cambridge University Press, 2015.
- Brown, Chris, and Kirsten Ainley. *Understanding international relations*. Palgrave Macmillan, 2009.
- Cerny, Philip G. *Rethinking world politics: a theory of transnational neopluralism*. Oxford University Press, 2010.
- Chaudary, Ganga Dhar. 2005, *Politics, Ethics, and Social Responsibility of Business*, Paragon books.
- Giddens, Anthony. *The nation-state and violence*. Vol. 2. Univ of California Press, 1985.
- Göksel, Nilüfer Karasculu. 2004, *Globalization and the State*, Dokuz Eylül University, Izmir.
- Held, David. 1989, *Political Theory and the modern state*, Stanford University Press, California.
- Held, David. & McGrew A. 1998, "The end of the old order?," *Review of International Studies*, vol.24.
- Heywood, Andrew (2011) *Global Politics*, Palgrave Macmillan, Palgrave Foundation Series.
- Hirst, Paul Q. & Thompson, Grahame. 1996, *Globalisation in question: International Economy and the possibilities of governance*, Blackwell, Cambridge.

- Huelshoff, Michael G. "Domestic politics and dynamic issue linkage: a reformulation of integration theory." *International Studies Quarterly* 38.2 (1994): 255-279.
- Hurrell, Andrew. *On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society: Power, Values, and the Constitution of International Society*. Oxford University Press, 2007.
- Jackson, Robert. & Sorensen, Georg. 1999, *Introduction to international relations*, Oxford University Press, New York.
- Jacques, Martin, 2009, *When China rules the world: the rise of the Middle Kingdom and the end of Western World*, The Penguin Press.
- Little, Richard, and John Williams, eds. *The anarchical society in a globalized world*. Palgrave Macmillan, 2006.
- Ohmae, Kenichi. 1996, *The End of Nation State: The rise of regional Economics*, Harper Collins, London.
- Pami Aalto et al, (2011) *International Studies Interdisciplinary Approaches*. (PALGRAVE MACMILLAN)
- Scholte, Jan Aart. *Globalization: A critical introduction*. Palgrave Macmillan, 2005.
- Suganami, H. (1978) 'A Note on the Origin of the Word "International" ', *British Journal of International Studies*, 4(3): 226–32.
- Strange, Susan. 1997, "The erosion of the State," *Current History*, 96 (613).
- Krasner, Stephen D. 1993, "Westphalia and all that," dalam *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*, J. Goldstein & Robert O, Keohane (eds), Cornell University Press, Ithaca.
- Krugman, Paul. "Can Europe be saved." *The New York Times* 12 (2011): 01.
- Weiss, Linda. 2000, "Globalization and state power," *Development and Society*, Vol. 29, No.1, June (1-15).

Online

Anonym, n.d. [online] www.pfhub.com/financial-crisis/

Anonym. 2010. *Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe's Crisis.*
[online]

www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all

Lynn, Matthew. "Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis." (2011).

<http://www.e-ir.info/2016/06/29/brexit-the-result-and-its-implications/>.
Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.

<http://www.economist.com/node/21552555>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.

<http://www.iseas.edu.sg/trends996.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2016.